

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program pemerintah merupakan suatu bentuk kegiatan yang menjadi dasar pelayanan publik terhadap masyarakat. Dimana masyarakat merupakan bagian dari orang-orang yang berkumpul dan hidup serta tinggal secara bersamaan, memiliki hubungan dan saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu lainnya untuk mencapai suatu kepentingan yang hendak dicapai. Terdapat masyarakat setempat yang tinggal di sebuah desa maupun kota, yang disebut sebagai warga yang berada di suatu bangsa atau negara. Dalam sebuah negara tentu adanya pemerintah yang bertugas melayani segala lini kehidupan sebuah masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memiliki berbagai program sebagai bentuk pembangunan yang dicetuskan pemerintah.

Dengan adanya program tersebut pemerintah berharap dapat tercapainya suatu kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di suatu negara. Indonesia salah satunya, merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Maka dari itu, pemerintah melakukan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan guna memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdaya dan sejahtera merupakan suatu keadaan masyarakat dimana masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Adapun keadaan lain dimana masyarakat tidak mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan baik, adanya masalah-masalah sosial, masalah kesehatan dan sebagainya dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mengalami kemiskinan.

Gambaran dari kurangnya materi untuk mencukupi kebutuhan dasar menjadi sebuah situasi yang dapat menyudutkan seseorang menjadi orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan harta benda seperti kelangkaan memperoleh kebutuhan dasar, ketergantungan, dan ketidakmampuannya dalam beradaptasi dengan masyarakat lain. Kurangnya penghasilan menjadi persoalan yang dapat mengundang berbagai faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan kesejahteraan hidup yang dapat terlihat dari ketidakmampuan seseorang dalam keagalannya untuk pemenuhan hak-hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Yasmil dan Adang, 2013:260).

Kemiskinan saat ini menjadi persoalan universal yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk salah satu masalah sosial yang sifatnya global, dimana kemiskinan ini menjadi masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian bersama, belum adanya solusi yang tepat guna memecahkan persoalan tersebut, sehingga kesejahteraan saat ini hanya dirasakan oleh segelintir orang yang dapat menikmati hasil dari pembangunan. Dimana yang menjadi mayoritas di negeri ini adalah masyarakat yang berada dalam taraf kehidupan menengah kebawah. Dewasa ini kemiskinan sendiri menjadi sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat di hindari oleh setiap negara, terlebih angka

kemiskinan yang semakin meningkat dan selalu bertambah akan menimbulkan sebuah masalah baru bagi masyarakat.

Masalah sosial yang dialami Indonesia saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam sebuah masyarakat, salah satunya dalam taraf kesejahteraan sosial. Terjadinya kenaikan bahan pokok akan membawa masyarakat pada kemiskinan. Di karenakan adanya kelangkaan yang bersifat materi atau ketiadaan barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya kebutuhan makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal, adanya suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Dikatakan miskin dalam hal materi ini dapat di pahami sebagai salah satu situasi dimana seseorang benar-benar sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh suatu barang sebagai kebutuhan dasar manusia (Edi Suharto, 2013:15).

Masalah dalam kemiskinan nampaknya sudah menjadi sebuah gejala yang dirasa sangat populer dan umum dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Oleh karena itu pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu program andalan pemerintah di sebuah negara, upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dan bahkan Bank Dunia sekalipun menyebutkan bahwa angka kemiskinan di negeri ini bukan sekedar ada dalam 20% penduduk yang hidup dalam belunggu kemiskinan, tetapi faktanya membuktikan bahwa kurang lebih 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu upaya pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kebutuhan dalam pembangunan yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat (Mardikanto, 2015:114).

Sebagian besar masyarakat di negara Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan berupa beras yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kini beras menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu membeli beras dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah mencoba mengantisipasi pemasokan beras ke setiap daerah, agar masyarakat dapat tetap merasakan dan menjadikan beras sebagai bahan primer pangan yang dikonsumsi masyarakat. Sangat disayangkan, meskipun lahan persawahan di Indonesia sangatlah banyak, tetapi itu tidak menjamin seluruh masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil tersebut.

Kendati demikian dalam upaya mensejahterakan pemerintah berusaha menciptakan suatu program, salah satunya melalui bantuan Beras Miskin (Raskin). Program ini diharapkan agar masyarakat dapat merasakan kepedulian pemerintah dengan memberikan pasokan beras pada setiap bulannya, dengan beras yang dirasa dapat terjangkau oleh masyarakat bawah dengan harga jual yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Bahkan saat ini bantuan tersebut tidak lagi untuk dijual tetapi langsung diberikan kepada masyarakat secara gratis. Program tersebut sangatlah membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kalangan bawah.

Mekanisme dalam penyaluran program raskin tentu memiliki keterlibatan penuh antara pemerintah, aparatur desa dan warga setempat. pemerintah sudah dengan sangat rapih mengatur pendistribusian beras untuk setiap daerah, akan tetapi semua kembali pada masing-masing desa apakah penyaluran tersebut memang sudah

berjalan dengan baik atau sebaliknya. Seharusnya sebagai petinggi desa aparaturnya memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai adanya program raskin yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, sosialisasi harus merata dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat selaku warga desa, agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman mengenai adanya program tersebut.

Permasalahan yang terjadi sekarang ini masyarakat terkecohkan dengan adanya program bantuan, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya sebagai warga yang perlu untuk dibantu, terlebih jika melihat harga kebutuhan pangan yang semakin melonjak dan membuat masyarakat resah akan terjadinya kenaikan yang membuat masyarakat terus menerus mempertahankan dirinya agar tetap mendapatkan bantuan raskin. Kurangnya sosialisasi memberikan dampak besar bagi berjalannya penyaluran bantuan.

Pemerintah menciptakan program beras miskin ini bertujuan untuk membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang adil dan tepat pada orang yang berhak serta tepat sasaran. Lain halnya dengan kasus yang dialami masyarakat di suatu desa tepatnya di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Dimana pada awalnya bantuan tersebut sangat membantu dan dapat dirasakan masyarakat, meskipun sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai pendataan terhadap masyarakat yang mendapat bantuan, yang pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan suatu konflik pada masyarakat desa. Hal ini berawal dari asumsi masyarakat bahwa pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tentunya berhak untuk menentukan orang-orang

mana yang dirasa sesuai untuk diberi bantuan, namun seringkali dirasa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di rasakan masyarakat.

Dalam mengatasi atau memberikan sebuah alternatif terhadap masalah kemiskinan yang dapat dilakukan melalui keberdayaan. Dimana masyarakat dapat memilih jalannya dalam mengatasi kemiskinan, sejak di berlakukannya program Inpres No.5 tahun 1993 yang dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu, pendayagunaan dan pengentasan kemiskinan seringkali disebut memiliki kesamaan dan menjadi topik serta kata kunci dari sebuah upaya pembangunan (Mardikanto,2015:115). Hal tersebut tentu tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan Bank Dunia telah menetapkan pendayagunaan atau pemberdayaan sebagai upaya atau strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam definisinya pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan daya atau kekuatan kepada setiap masyarakat. dimana adanya keberdayaan sebagai kemampuan individu untuk membangun pemberdayaan yang akan berkaitan dengan kehidupan dalam menyangkut pemenuhan sumberdaya dalam memenuhi dan memperoleh kehidupan yang layak dalam sebuah masyarakat.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut bahkan akan memperburuk keadaan dengan terciptanya suatu ketergantungan sosial dan meningkatnya kemiskinan pada masyarakat bawah. Terjadinya suatu ketergantungan bagi masyarakat yang sering menerima bantuan, sehingga program penerimaan bantuan beras seharusnya mendorong masyarakat agar memiliki rasa ingin maju, dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi

berbeda dengan kasus disini, masyarakat malah semakin merasa memiliki ketergantungan yang tidak dapat ditinggalkan, apabila orang yang biasanya menerima bantuan raskin pada setiap bulannya tidak terdaftar lagi namanya sebagai penerima raskin, maka masyarakat tersebut akan melakukan protes kepada aparat desa yang memproses kebijakan terhadap masyarakat penerima bantuan. Itu artinya masyarakat tidak menerima apabila namanya tidak tercantum di daftar yang telah di data, dan menyatakan kekecewaannya dengan cara protes dan tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap aparat desa.

Problematika yang menjadi faktor sebenarnya adalah ketika adanya ketergantungan masyarakat khususnya masyarakat desa terhadap bantuan yang diberikan pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat apabila tidak menerima bantuan dari pemerintah (Sukidin, 2009:203). Masyarakat menjadi individu yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan kemandirian bagi kehidupan keluarganya, dengan menunggu adanya bantuan yang diberikan pemerintah, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup serta adanya sikap mempertahankan kemiskinan dengan cara bergantung terhadap pemberian dari bantuan tersebut.

Menurut Warrner bahwa manusia memiliki sifat bergantung sesuai dengan bentuk masyarakat sebagai dasar pada kualitas diri, hakikatnya manusia sangat bergantung terhadap perilaku dan sifat yang ada pada dirinya (W.Syam dan Nina, 2009:41). Program bantuan beras miskin yang ada di setiap daerah tentu sudah menjalar dan masuk ke desa-desa dimana desa yang dimaksud disini ialah desa

Sukasetia yang terletak di Kecamatan Cihaurbeuti yang berada pada wilayah Kabupaten Ciamis, sebuah Kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran. Desa Sukasetia sendiri terkenal dengan alamnya yang asri dan masih memiliki banyak hutan dan persawahan yang membentang luas, dan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian sebagian besar warga desa Sukasetia.

Sebuah permasalahan yang besar apabila di sebuah desa yang subur akan persawahannya masih terdapat masyarakat yang kekurangan akan sumber bahan pokok, yaitu beras, dimana baru sebagian masyarakat yang dapat memanfaatkan tanah dan persawahan secara optimal, dan sebagiannya lagi tidak dapat memanfaatkan kekayaan sumber alam yang ada. Dikarenakan tanah dan persawahan di desa masih dimiliki oleh perorangan, adapun jika dikelola oleh warga setempat, ada petani sebagai pemilik dan petani sebagai buruh tani di persawahan tersebut. maka dari itu, masih banyak warga desa yang terbilang belum bisa memenuhi kebutuhan primernya atau berada pada tingkat kemiskinan yang memang dirasa membutuhkan bantuan yang dapat meringankan beban hidup keluarganya dan dibantu dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat.

Di desa sukasetia sendiri tentu adanya kriteria warga yang seharusnya menerima bantuan beras miskin yang di berikan pemerintah. Pertama, orang tersebut harus berdomisili dan tercatat sebagai warga desa sukasetia, memiliki pendapatan dalam kategori masyarakat bawah, dilihat dari kondisi kehidupan sehari-hariya, tidak memiliki harta benda yang dapat menunjang kehidupan, dan terdata sebagai warga

yang harus menerima bantuan. Aparat desa tidak serta merta memberikan bantuan pada warganya, berlakunya syarat-syarat yang menjadi penentu apakah warga tersebut dapat menerima bantuan atau tidak menjadi tolak ukur aparat desa terhadap masyarakat yang dapat menerima bantuan beras miskin.

Ketergantungan warga desa dalam program penyaluran beras miskin menjadi sebuah masalah besar yang terjadi dalam masyarakat, berawal dari fakta yang terjadi di tempat kejadian diatas, maka saya bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme program Raskin, sosialisasi program Raskin, serta keberhasilan yang dicapai dalam program bantuan Raskin di desa Sukasetia. Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut. Peneliti tertarik tentang *“Kontribusi Bantuan Beras Miskin (Raskin) dalam Menanggulangi Ketergantungan Sosial (Penelitian tentang Perilaku Ketergantungan Raskin di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis)”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tentu sudah bukan lagi rahasia yang tidak diketahui publik, kemiskinan yang kini menjadi salah satu masalah sosial yang belum menemukan solusi,

bukannya semakin berkurang, tetapi malah menjalar ke berbagai penjuru kota maupun desa di negeri ini.

2. Beras miskin yang merupakan suatu program bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat di setiap daerah, dimana memiliki sebuah tujuan awal dalam upaya membantu rakyatnya. Pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan untuk mensejahterakan kehidupan bersama.
3. Mekanisme bantuan raskin dengan melibatkan seluruh masyarakat penerima manfaat dengan cara mensosialisasikan kepada warga setempat tujuan diadakannya Beras Miskin (Raskin).
4. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya terlebih dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti halnya pangan, masyarakat dapat merasakan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya.
5. Terjadi dilema manakala bantuan tersebut malah menimbulkan perilaku masyarakat yang semakin bergantung terhadap adanya bantuan beras dari pemerintah.
6. Hal tersebut tentunya tidak boleh dibenarkan, dengan adanya bantuan tersebut berharap dapat menciptakan kemandirian pada masyarakat, dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga, dan dapat bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan yang selama ini membelenggu dalam kehidupannya.

7. Maka dari itu, sifat ketergantungan yang saat ini terjadi dalam masyarakat harus di hilangkan dan di berikannya solusi terhadap perilaku yang dirasa sudah melekat dan menjadikan masyarakat selalu bergantung pada pemberian. Sebuah solusi atau alternatif dalam mengatasi permasalahan saat ini, dapat melalui pendayagunaan masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk mengatasi sifat ketergantungannya itu. Berharap dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara melakukan kegiatan yang sekiranya dapat membantu memperbaiki kehidupan menjadi lebih maju dan mandiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi Program Beras Miskin (Raskin) yang dilakukan di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimana mekanisme Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ?
3. Bagaimana keberhasilan yang di capai Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sosialisasi Program Beras Miskin (Raskin) yang dilakukan di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui mekanisme Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui keberhasilan yang di capai Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan manfaat yang telah dipaparkan di atas dan menjadi fokus kajian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, demi tercapainya semangat akademik serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial seperti sosiologi, terutama yang berkaitan dengan kajian tentang kontribusi bantuan Beras Miskin (Raskin) dalam menanggulangi ketergantungan sosial di daerah yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan sumber referensi dan pertimbangan bagi jurusan sosiologi dan pemerintah, khususnya bagi yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kontribusi bantuan Raskin dalam menanggulangi ketergantungan sosial, penelitian ini berguna

sebagai acuan pada program-program selanjutnya. Diharapkan dapat membantu aparat Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dalam memecahkan masalah ketergantungan masyarakat desa. Serta memberikan pengarahan pada masyarakat agar dapat menciptakan kemandirian masyarakat, agar dapat hidup adil dan sejahtera tanpa memiliki ketergantungan penuh terhadap bantuan dari pemerintah. Serta dapat mengelola bantuan secara baik dan bijaksana agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan sudah dalam kategori masalah sosial yang menjadi perbincangan masyarakat umum, sudah bukan lagi suatu rahasia yang tidak diketahui rakyat banyak. Terjadinya kemiskinan sebagai akibat dari sebuah pembangunan ekonomi yang salah, sehingga penting diadakannya suatu pemberdayaa bagi masyarakat yang berada di suatu daerah tertentu. Orang yang dapat dikatakan sebagai orang miskin ialah dimana ia sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan layak, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang sepatutnya dirasakan, dan ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga terus berada dalam belenggu kemiskinan. Miskin yang dirasa sebagai bentuk tidak mampunya masyarakat dalam meningkatkan standar hidup, tidak mampu membesarkan dan mendidik anak secara layak, dimana kondisi

seseorang yang kehilangan sumber pendapatan dan berada pada posisi kehidupan yang serba kekurangan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Jamaludin, 2015:236).

Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang harus di hilangkan. Dimana miskin dalam bahasa Arab *farqu* yang bermaknakan *ihtiyaj* yaitu membutuhkan, adapun sebutan bagi orang yang membutuhkan ialah *Alfaqir*. Sedangkan secara Syara' makna dari kata *faqir* yaitu orang yang benar membutuhkan, dalam artian orang tersebut merupakan orang yang berada dalam keadaan lemah dan tidak dapat dimintai sesuatu apapun yang sifatnya harta benda (Wargadiningrat, 2011:14).

Sejatinya tidak ada seorangpun yang menginginkan menjadi orang miskin, terkadang kemiskinan menjadi suatu masalah besar yang dahulu ada dan menjadi sebuah warisan budaya yang terus membesar hingga saat ini, terpelihara dan semakin merajalela dalam kehidupan (Suparlan, 2000: 5). Soerjono menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak sanggup atau tidak dapat memelihara dirinya sendiri dalam memenuhi taraf hidup di dalam kelompoknya serta ketidakmampuannya dalam memanfaatkan tenaga mental, moral maupun fisiknya dalam kelompok masyarakat (Soekanto, 2012: 320).

Sebuah istilah mengenai masyarakat yaitu orang yang berkawan serta melakukan interaksi untuk mendapatkan teman dan melakukan perkumpulan yang pada akhirnya akan menciptakan kebiasaan dalam mempertahankan kehidupannya agar dapat bergaul dengan orang lain. Kaena pada hakikatnya bahwa manusia

diciptakan dengan berbagai suku dan ragam untuk dapat saling mengenal dan membutuhkan antara satu sama lain dikarenakan tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu dibentuklah komunitas yang terdiri dari kelompok-kelompok yang hidup dalam suatu bangsa untuk menjalankan suatu kehidupan bersama yang disebut dengan pemerintahan.

Pemerintah memiliki program bantuan dalam pendistribusian pangan ke setiap daerah, pangan yang dimaksud ialah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sering kali di konsumsi untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Tandanya bahwa pemerintah masih memiliki kepedulian penuh terhadap rakyatnya, dalam bentuk memberikan bantuan beras miskin untuk masyarakat yang kurang mampu dalam segi perekonomian, program bantuan beras tersebut mulanya diberikan untuk masyarakat miskin dengan harga jual yang murah, tetapi belakangan ini pemberian bantuan beras diberikan secara gratis tanpa adanya pungutan biaya dan tidak untuk diperjual belikan. Program yang dikeluarkan pemerintah ini sebagai bentuk pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat, terkhusus masyarakat yang memerlukan bantuan sumber pangan, serta memang termasuk dalam kategori masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan beras miskin.

Bertujuan memberikan bantuan terhadap masyarakat dan dapat menjangkau keluarga miskin yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok beras, uapaya meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat keluarga penerima manfaat dan pembagian dilakukan melalui ketua rukun warga untuk disalurkan kepada setiap keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan, untuk mengurangi

beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam rangka peningkatan bahan pokok keluarga.

Pelaksanaan pendistribusian beras miskin merupakan suatu tanggung jawab lembaga yang bersangkutan diantaranya perum BULOG dan pemerintahan daerah atau Pemda setempat. Penyaluran yang dilakukan Perum Bulog ke setiap daerah yang tercatat sebagai tempat distribusi, sedangkan tanggung jawab Pemda ialah penyaluran beras dari tempat distribusi kepada pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk disalurkan dimana keberhasilan tingkat penyaluran tidak dapat dilihat secara kasat mata saja, karena Raskin ini merupakan sebuah program dari pemerintah untuk melaksanakan penyaluran beras bersubsidi kepada keluarga sasaran. Sehingga berdasarkan dari tinjauan lapangan melalui apa yang terjadi di lapangan bahwasannya pelaksanaan bantuan sudah dianggap baik, tetapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya ketidak berdayaan masyarakat dengan adanya program bantuan tersebut sehingga malah menimbulkan ketergantungan.

Jika dilihat dari fakta yang berada di lapangan bahwasannya yang menjadi permasalahan disini ialah, bahwa dengan program bantuan tersebut adanya antusias tinggi dari masyarakat, yang menjadikan masyarakat berharap penuh atas penerimaan bantuan beras miskin yang di programkan oleh pemerintah. Masyarakat menjadi rakyat yang konsumtif dan memiliki ketergantungan penuh atas apa yang diberikan pemerintah. Mekanisme dalam penyaluran terlihat baik, akan tetapi adanya beberapa ketentuan yang jarang di terima masyarakat mengenai sosialisasi yang diberikan aparaturnya kepada warganya, sehingga masyarakat gagal paham mengenai program

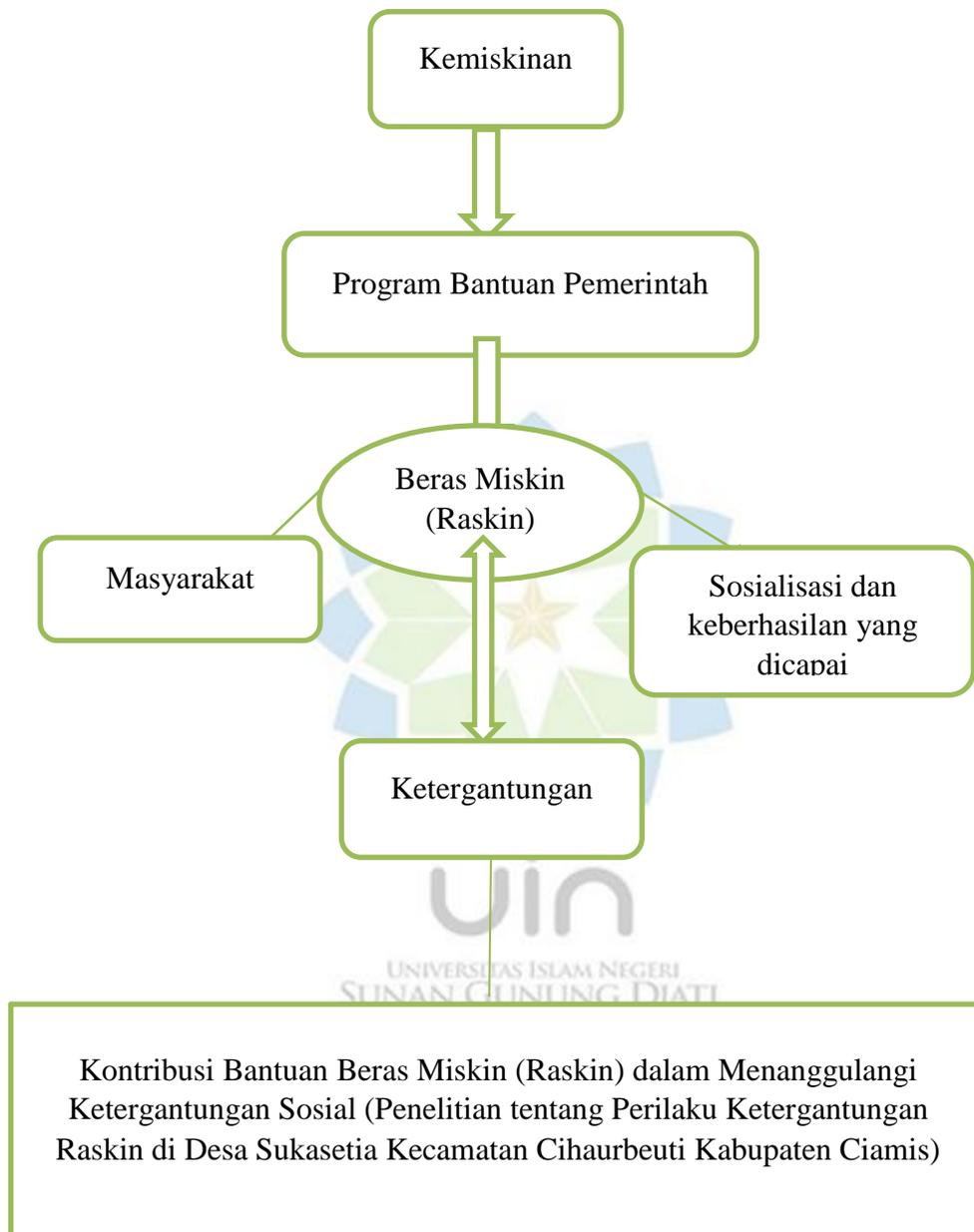
bantuan yang diberikan pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang secara terus menerus mempertahankan diri agar tetap mendapatkan bantuan raskin dan belum memiliki kesadaran terhadap kegunaan bantuan yang disalurkan pemerintah bagi setiap masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dilihat dari satu sisi bahwasannya program yang baik ini memang sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang memang sepatutnya menerima bantuan dari pemerintah. Tetapi disisi lain bantuan tersebut malah membuat masyarakat terbelenggu dalam jurang kemiskinan yang menjadikan masyarakat memiliki mental yang lemah, dan menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak dapat maju dan terus berada dalam kemiskinan, serta kurangnya semangat juang seseorang dalam memotivasi dirinya agar dapat memiliki kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

Ketergantungan tersebut membuat masyarakat penerima bantuan terus mempertahankan dirinya agar tetap berada pada posisi dimana ia terus mendapatkan beras yang di berikan pemerintah. Apabila ia tidak terdata sebagai warga penerima bantuan, maka akan adanya suatu konflik seperti warga yang protes terhadap kinerja aparatur desa atau kepada ketua rukun warga yang menjadi pendistribusi beras kepada keluarga sasaran yang telah di data sebelumnya. Perseteruan tersebut dianggap sebagai ketidakadilan aparat desa kepada warga yang biasanya tercatat sebagai warga penerima, dan di suatu masa warga tersebut tidak tercatat lagi sebagai masyarakat penerima bantuan, sehingga sikap yang akan terjadi setelah itu ialah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para staf desa dan jajarannya.

Pemerintah berharap masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat terbantu dalam hal memenuhi kebutuhan pangannya, dengan begitu masyarakat dapat menggunakan pendapatan yang ia miliki sebagai pemasukan dan dapat memberdayakan dirinya dan keluarganya agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya secara layak, sekurang-kurangnya dapat menghidupi istri dan anak-anaknya agar dapat terpenuhi makannya, memiliki hunian untuk ditinggali, kesehatan yang utuh, pendidikan yang seharusnya diterima anak untuk wajib belajar dan mendapatkan ilmu.

Masyarakat dapat hidup secara mandiri dalam artian bahwa masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, tidak lagi bergantung pada apa yang di terimanya dalam bentuk pemberian, masyarakat yang mengandalkan pemberian baik dari perorangan maupun pemerintah berharap dapat memberdayakan dan memberikan kekuatan pada dirinya agar tidak lagi tergantung dan dapat merubah kehidupannya agar lebih baik lagi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima, secara jelas menegaskan bahwa selaku insan manusia yang tinggal di bumi ini masyarakat harus terus berusaha dan meyakini bahwa apa yang dilakukannya hari ini merupakan harapan yang akan dicapai di masa mendatang.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran